

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan tetap menjadi tantangan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, isu kemiskinan terus menjadi fokus utama pemerintah dan menjadi salah satu isu serius yang perlu ditangani. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya, yakni pangan, sandang, kesehatan serta hunian tinggal (Hardinandar, 2019). Kemiskinan di Indonesia telah menjadi permasalahan lama yang terus meningkat setiap tahunnya. Tingkat kemiskinan akan berpengaruh secara signifikan pada pembangunan perekonomian negara. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) lebih dari 26,3 juta orang (9,57% dari populasi) hidup di bawah garis kemiskinan per September 2022. Tingginya tingkat kemiskinan tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Maka dari itu, pemerintah melaksanakan sejumlah usaha guna menanggulangi hal tersebut.

Berbagai macam usaha sudah dilaksanakan oleh pemerintah, contohnya melalui dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang dapat menekan angka kemiskinan contohnya pengadaan bantuan sosial guna membantu meringankan beban kemiskinan. Terdapat banyak program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai atau lebih dikenal dengan BPNT. Menurut Hutagalung, dkk (2022) BPNT adalah program bantuan dari pemerintah yang dibayarkan dalam bentuk non tunai setiap bulannya. Menurut Gultom, dkk (2020) BPNT berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kemiskinan pada tingkat keyakinan 99%. Program BPNT diantisipasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kebiasaan pengeluaran rumah tangga. Distribusi beras bersubsidi kepada kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah memiliki tujuan guna meringankan beban finansial penerima manfaat untuk mencukupi kebutuhan makanan. Sebagai penyempurnaan dari program Raskin dan Rastra yang telah diterapkan sebelumnya, BPNT mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas bantuan sosial bagi yang membutuhkan.

Namun, pada kenyataannya saluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah sering kali tidak tepat sasaran. Keterbatasan jumlah bantuan yang akan disalurkan ke masyarakat serta adanya kemiripan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, adanya subjektivitas pada pengambilan keputusan yang menyebabkan penyaluran bantuan belum dirasakan masyarakat secara optimal, terutama masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tentu bertolakbelakang dengan tujuan dibuatnya program bantuan sosial yang diharapkan dapat disalurkan secara efektif untuk membantu masyarakat. Menurut Lubis, dkk (2020) Efektivitas program bantuan sosial diukur dari kesesuaian sasaran penerima berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditentukan. Permasalahan juga terjadi di Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Berlandaskan pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Badan Pusat Statistik Bali, 2023), Kabupaten Tabanan termasuk ke dalam 5 besar kabupaten miskin yang ada di Bali dengan banyaknya penduduk kategori miskin sebanyak 21,42 ribu jiwa.

Banyaknya penduduk miskin yang tidak sebanding dengan jumlah bantuan sosial yang tersedia bagi masyarakat tentu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari pemerintah desa untuk menentukan prioritas dari masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Masyarakat yang menganggap BPNT kurang tepat sasaran dan menimbulkan adanya kecemburuan sosial sehingga memunculkan rasa ketidakpuasan masyarakat yang akan berakibat tujuan program BPNT di Desa Bangli tidak tercapai secara maksimal. Sehingga ketepatan sasaran penyaluran program bantuan sosial perlu diuji kebenarannya.

Untuk mengatasi permasalahan dalam penerimaan BPNT perlu suatu sistem pengambilan keputusan yang bisa memudahkan dalam mempertimbangkan calon-calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati. Metode kombinasi antara AHP dan TOPSIS ialah contoh pendekatan yang dipergunakan pada suatu pengambilan keputusan. Metode AHP dipergunakan dalam pemberian bobot dan menguji konsistensi dari tiap kriteria Berdasarkan matriks perbandingan kriteria. Kemudian TOPSIS dimanfaatkan pada proses perangkingan dengan menetapkan jarak alternatif terhadap solusi ideal positif serta solusi ideal negatif.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka peneliti melakukan perangkingan masyarakat miskin untuk memaksimalkan program BPNT dengan menerapkan metode kombinasi AHP-TOPSIS.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan, bisa dirumuskan sejumlah masalah meliputi.

1. Bagaimana implementasi metode kombinasi AHP-TOPSIS untuk pengambilan keputusan BPNT di Desa Bangli?
2. Bagaimana akurasi dan efektivitas kombinasi metode AHP-TOPSIS untuk pengambilan keputusan BPNT di Desa Bangli?
3. Bagaimana kesesuaian hasil perhitungan manual dengan perhitungan pada aplikasi untuk kombinasi metode AHP-TOPSIS dalam pengambilan keputusan BPNT di Desa Bangli?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Kajian ini mempunyai sejumlah tujuan, yakni.

1. Untuk mengetahui penerapan metode kombinasi AHP-TOPSIS untuk pengambilan keputusan BPNT di Desa Bangli.
2. Untuk mengetahui akurasi dan efektivitas metode kombinasi AHP-TOPSIS untuk pengambilan keputusan BPNT di Desa Bangli.
3. Untuk mengetahui kesesuaian hasil perhitungan manual dengan perhitungan pada aplikasi untuk kombinasi metode AHP-TOPSIS dalam pengambilan keputusan BPNT di Desa Bangli.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini memberikan berbagai manfaat yang bisa didapat, antara lain.

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Manfaat teoritis yang diinginkan dari kajian ini ialah berkontribusi dalam konteks intelektual dengan memperkaya literatur ilmiah dan pemikiran dalam bidang matematika. Khususnya, penelitian ini berfokus pada pengambilan

keputusan dengan metode kombinasi AHP-TOPSIS, sehingga diharapkan dapat mengembangkan pemahaman dan penerapan metode ini dalam konteks yang lebih luas.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Penulis

Harapannya, kajian ini bisa memberikan pengalaman serta wawasan untuk meneliti masalah tentang perangkingan untuk pengambilan keputusan penerima BPNT di Desa Bangli dengan mengimplementasikan metode kombinasi AHP-TOPSIS.

b. Bagi Pembaca

Dengan kajian ini, harapannya bisa memperkaya pengetahuan yang bermanfaat selaku referensi dalam konteks pengambilan keputusan menggunakan metode kombinasi AHP-TOPSIS.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan nilai tambah bagi entitas di sektor sosial, khususnya Dinas Sosial. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi Dinas Sosial dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi bantuan sosial.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk memastikan fokus pembahasan penelitian ini tetap terjaga dan hasilnya mendekati inti permasalahan yang diteliti, berikut merupakan sejumlah batasan permasalahan yang diidentifikasi dalam kajian ini:

1. Data yang dipergunakan pada kajian ini ialah data P3KE Desil 1-3 Desa Bangli Tahun 2022, yang di dalamnya termuat data masyarakat yang menerima bantuan sosial.
2. Parameter yang dipergunakan dalam kajian ini yakni, Pekerjaan Kepala Keluarga, Pendidikan Kepala Keluarga, Status Kepemilikan Rumah, Memiliki Simpanan Uang/Perhiasan/Ternak/Lainnya, Jenis Atap, Jenis Dinding, Sumber Penerangan, Bahan Bakar Memasak, Sumber Air Minum, Memiliki Fasilitas Buang Air Besar.
3. Model aplikasi perangkian bantuan pangan non tunai yang dibangun menggunakan model *waterfall* saat ini dibuat hanya sampai pada tahap implementasi dan pengujian. Karena itu, aplikasi yang telah dikembangkan hanya dapat diakses melalui laptop atau PC dengan proses pengiriman file *source code* secara manual. Kendala ini mengimplikasikan bahwa aksesibilitas aplikasi terbatas pada lingkungan pengembangan yang spesifik.

